

**DEMOKRASI DI LINGKUP LOKAL
(STUDI PROSES PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TAHUN 2014-2020) DI DESA TANJUNG SELAMAT
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

**OLEH:
MUHAMMAD RIDWAN
NPM : 128510008
PROGRAM STUDI KEPEMERINTAHAN**



**FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRAK

DEMOKRASI DI LINGKUP LOKAL (STUDY PROSES PEMILIHAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN 2014-2020) DI DESA TANJUNG SELAMAT KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG

MUHAMMAD RIDWAN

128510008

Desa memiliki lembaga yang namanya Badan permusyawaratan Desa (BPD) atau bisa kita katakan DPR Kecil di Desa yang memiliki tugas membuat peraturan Desa, menyerap aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan terhadap pemerintahan Desa. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat demokrasi di lingkup lokal pemilihan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Tanjung Selamat Kecamatan Percut Sei Tuan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan sifat deskriptif yang dapat digunakan pada penelitian yang memerlukan pengungkapan tentang fenomena sosial secara mendalam. Waktu Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2016 - April 2016.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan di Desa Tanjung Selamat dalam pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Ketua, belum berjalan dengan baik dikarenakan masih melanggar pola keterwakilan perempuan dan melihat tingkat demokrasi masyarakat Tanjung Selamat masih rendah dilihat dari masyarakat yang hadir dalam Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa dan ketua, masyarakat tidak aktif di dalam forum.

Kata Kunci : Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa, Demokrasi

ABSTRACT

DEMOCRACY AT THE LOCAL SCOPE (STUDY THE VILLAGE CONSULTATIVE BODY CONCLAVE YEARS 2014 – 2020) IN THE VILLAGE TANJUNG SELAMAT DISTRICT PERCUT SEI TUAN SUBDISTRICT DELI SERDANG

MUHAMMAD RIDWAN

128510008

The village has an agency called deliberative body used to say DPR village or small village which has the task of creating a village regulation, absorb the aspirations of rural communities, and to supervise the village government. The purpose of this study to see democracy in the local scope conclave village Badan Permusyawaratan Desa (BPD) in the village Tanjung Selamat district Percut Sei Tuan subdistrict Deli Serdang.

This study used qualitative research methods. With descriptive nature that can be used in research of social phenomena in depth. The research was conducted in March 2016 to April 2016.

Based on data analysis conducted in the village of Tanjung Selamat in the election of members and chairman of the Badan Permusyawaratan Desa (BPD), did not run well because they violate the pattern of representation of women and see their democratic society Tanjung Selamat still low seen from the public who attended the election of the members and chairman of Badan Permusyawaratan Desa (BPD), people are not active in the forum.

Keyword : Election Badan Permusyawaratan Desa , Democracy

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR BAGAN	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Pembatasan Masalah	4
1.4 Perumusan Masalah	4
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1 Uraian Teori	7
2.1.1 Demokrasi	7
2.1.2 Pemerintahan yang Demokratis	9
2.2 Pemerintahan Desa	12
2.3 BPD (Badan Permusyawaratan Desa)	15
2.4 Dinamika Politik Lokal	15
2.5 Kerangka Pemikiran	20

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	22
3.1 Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian.....	22
3.1.1. Jenis Penelitian.....	22
3.1.2. Sifat Penelitian.....	23
3.1.3 Lokasi Penelitian.....	24
3.1.4. Waktu Penelitian.....	24
3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	24
3.3. Metode Analisis Data.....	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
4.1 Hasil Penelitian.....	28
4.1.1 Sejarah Desa.....	28
4.1.2 Visi dan Misi.....	29
4.1.3 Demografi.....	30
4.1.4 Pembagian Wilayah.....	34
4.1.5 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.....	35
4.1.6 Potensi Desa Tanjung Selamat.....	36
4.1.7 Masalah Desa.....	40
4.2 Pembahasan.....	44
4.2.1 Regulasi Proses Pemilihan BPD.....	44
4.2.2 Proses Pemilihan Ketua BPD.....	53
4.2.3 Pelantikan.....	56

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	57
5.1 Kesimpulan	57
5.2 Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menganut paham atau aliran demokrasi paska runtuhnya rezim otoriter di masa pemerintahan Presiden Suharto pada tahun 1998 puncak terjadinya demo besar-besaran untuk menurunkan pemerintahan orde baru. Tahun 1998 yang dipelopori oleh Bapak Amin Rais untuk menggerakkan mahasiswa yang melakukan aksi untuk menurunkan pemerintahan orde baru yang dipimpin oleh Presiden Pak Harto.

Mahasiswa di seluruh Indonesia menuntut pemerintahan orde baru untuk turun dari jabatan Presiden melihat Negara Indonesia sudah tidak stabil baik dalam bidang politik terlebih dalam bidang ekonomi. Demokrasi merupakan dimana masyarakat dapat menyuarakan pendapat serta argumentasi baik secara individu maupun secara kelompok. Menyampaikan aspirasi bisa secara tulisan dan juga secara lisan. Demokrasi merupakan paham yang mana masyarakat berkuasa untuk menentukan kebijakan yang diwakili melalui anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia.

Menurut Soerya Respantiana (2010:146) istilah Demokrasi berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena Kuno pada abad ke-5 SM. Kata Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos / cratein yang berarti pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai Pemerintahan dari Rakyat, oleh Rakyat untuk Rakyat.

Indonesia melaksanakan pemilihan Kepala Daerah Propinsi Kabupaten atau kota selama lima tahun sekali. Menurut Moch. Solekhan dalam bukunya penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana diungkapkan oleh Manor 1998 dan Cornwall dan Enventa 2001, bahwa pemerintahan lokal memiliki peluang besar untuk mendorong demokratisasi karena proses desentralisasi lebih memungkinkan adanya pemerintahan yang responsif, representatif, partisipatif, dan akuntabel. Karena itu, desentralisasi harus simultan membawa penguatan kapasitas institusi lokal dan membangun sistem pemerintahan yang lebih baik. Ditegaskan oleh Michel Pimbert (2001:81) bahwa potensi demokratisnya desentralisasi sangat mungkin tercapai manakala terdapat pelembagaan partisipasi masyarakat di tingkat lokal. Kalau tidak, manakala pemerintahan telah terdesentralisasi, kalangan elit lokal akan mendapatkan kekuasaan baru berpotensi untuk menengguk keuntungan sendiri, sehingga bisa memunculkan “raja-raja kecil”.

Negara Indonesia memiliki struktur pemerintahan yang jelas, dari pemerintahan tertinggi yang dipimpin oleh Presiden, Provinsi dipimpin oleh Gubernur, kabupaten dipimpin Bupati dan kota dipimpin walikota. Dari semua struktur pemerintahan di atas, Desa merupakan struktur pemerintahan yang paling rendah. Desa dipimpin oleh Kepala Desa yang memiliki masa jabatan selama 6 tahun dalam masa jabatan menurut peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2014. Desa memiliki lembaga yang namanya Badan permusyawaratan Desa (BPD) atau bisa kita katakan DPR Kecil di Desa yang memiliki tugas membuat peraturan Desa, menyerap aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan terhadap

pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki masa jabatan selama 6 tahun.

Melihat masyarakat Desa Tanjung Selamat kurang peduli dalam pemilihan, terkhusus dalam pemilihan Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini terlihat dari beberapa tahun yang lalu. Dikarenakan tingkat kepengurusan mengalami perubahan yang kurang baik dan tidak adanya perwakilan perempuan dalam pemilihan maupun dalam struktur. Hal ini membuat emansipasi perempuan mundur dalam pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Selamat.

Dari uraian yang penulis paparkan di atas Badan Permusyawaratan Desa kurang menjalankan tugas sebagaimana mestinya sebagai BPD. Dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim penulis ingin melihat proses pemilihan ketua Badan Permusyawaratan Desa dengan judul skripsi **“Demokrasi di lingkup lokal (Study proses Pemilihan Ketua Badan Permusyawaratan Desa tahun 2015-2020) di Desa Tanjung Selamat Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan sebuah proses pengenalan mendalam terhadap sebuah permasalahan. Dalam penelitian ini penulis perlu mengidentifikasi masalah mendalam demokratisasi di lingkup lokal proses pemilihan Badan Permusyawaratan Desa. Desa Tanjung Selamat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Adapun masalah yang harus diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Asumsi awal belum ada transparansi dalam pemilihan BPD
- b. Proses Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa belum berjalan dengan baik ?

1.3. Pembatasan Masalah

Dalam suatu penelitian yang bersifat formal pembatasan masalah sangat penting, sehingga penelitian yang dilakukan tidak melebar terlalu luas, sehingga isi uraian tidak menyimpang dan hasil penelitian tidak mengembang dengan tema yang diambil.

Maka penulis membatasi masalah sebagai berikut “Bagaimana proses pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Selamat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014-2020”.

1.4. Perumusan Masalah

Menurut Hermawan Warsito (1992:22) perumusan masalah adalah proses selanjutnya dari penelitian setelah masalah telah dipahami, pemahaman tersebut kemudian dirumuskan secara operasional dan jelas batasannya guna untuk pelaksanaan penelitian. Berdasarkan hasil tersebut penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana proses pemilihan Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Tanjung Selamat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tahun 2015-2020 ?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Segala sesuatu yang kita kerjakan atau tindakan yang kita lakukan baik itu positif maupun negatif pasti memiliki tujuan dan manfaat. Demikian dengan harapan Penulis Skripsi, penulis mengharapkan tulisan ini dapat bermanfaat untuk diri si penulis terkhusus untuk masyarakat luas.

Adapun tujuan penelitian ini, Sutrisno Hadi (1987:3) memberikan komentar sebagai berikut :

Suatu riset dalam Ilmu Pengetahuan Empiris pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha mendapatkan sesuatu untuk menguji kekosongan atau kekurangan, mengembangkan berarti memperluas dan menggali apa yang sudah ada. Sedangkan menguji kebenarannya dilakukan jika apa yang sudah ada menjadi diragukan kebenarannya.

Berdasarkan paparan di atas, harus terlebih dahulu memperhatikan obyek-obyek yang berhubungan dengan judul yang dibuat. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk melihat demokrasi di lingkup lokal pemilihan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Tanjung Selamat Kecamatan Percut Sei Tuan
- b. Untuk melengkapi persyaratan mendapatkan gelar kesarjanaan atau strata satu di Universitas Medan Area

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. dengan terselenggaranya penelitian ini penulis dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam bidang keilmuan dan dapat mengimplementasikan ilmu selama duduk di bangku kuliah di Universitas Medan Area.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi perorangan maupun secara kelompok serta mengembangkan ilmu yang sudah ada terkhusus dalam pemilihan badan permusyawaratan Desa.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

2.1.1. Demokrasi

Menurut Soerya Respatioo (2010:146) Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena Kuno pada abad ke-5 SM. Kata “*demokrasi*” berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos / cartein* yang berarti pemerintahan, sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun pemahaman arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem “*demokrasi*” di banyak negara. Seperti halnya pendapat dari beberapa ahli, sebagai berikut :

Jeff Hayness (2000) dalam bukunya Surya Respantiono (2010:146) membagi memberlakukan demokrasi ke dalam tiga model berdasarkan penerapannya. Ketiganya yaitu demokrasi formal, demokrasi permukaan (*façade*) dan demokrasi sbstantif. Ketiga model ini menggambarkan praktik demokrasi sesungguhnya yang berlangsung di negara manapun yang mempraktikkan demokrasi di atas bumi ini.

1. Demokrasi formal ditandai dengan adanya kesempatan untuk memilih pemerintahannya dengan interval yang teratur dan ada aturan yang mengatur pemilu. Peran pemerintah adalah mengatur pemilu dengan memperhatikan proses hukumnya.

2. Demokrasi permukaan (*façade*) merupakan gejala yang umum di Dunia Ketiga. Tampak luarnya memang demokrasi, tetapi sama sekali tidak memiliki substansi demokrasi. Pemilu diadakan sekadar *para os ingleses ver*, artinya “supaya dilihat oleh orang Inggris”. Hasilnya adalah demokrasi dengan intensitas rendah yang dalam banyak hal tidak jauh dari sekadar polesan pernis demokrasi yang melapisi struktur politik.
3. Demokrasi substantif menempati ranking paling tinggi dalam penerapan demokrasi. Demokrasi substantif memberi tempat kepada rakyat jelata, kaum miskin, perempuan, kaum muda, golongan minoritas keagamaan dan etnik, untuk dapat benar-benar menempatkan kepentingannya dalam agenda politik di suatu negara. Dengan kata lain, demokrasi substantif menjalankan dengan sungguh-sungguh agenda kerakyatan, bukan sekadar agenda demokrasi atau agenda politik partai semata.

Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris, “*It has been said that democracy is the worst form of government except all the others that have been tried.*” Demokrasi bukan sistem pemerintahan terbaik, tetapi belum ada sistem lain yang lebih baik daripadanya.

Demokrasi berkembang menjadi sebuah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah adanya pembagian kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, yudikatif dan legislatif. Ketiga lembaga ini harus terpisah dan independen dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar

ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.

2.1.2. Pemerintahan Yang Demokratis

Menurut Miftah Thoha (2014 : 152-162) Semua pihak yang mengendalikan Pemerintahan juga menyatakan pihaknya sangat demokratis. Bung Karno dahulu, tidak mau dikatakan pemerintahannya tidak demokratis, walaupun akhirnya berpisah dengan Wakil Presiden Moh. Hatta gara-gara demokrasi yang dijalankan tidak sesuai dengan pemikiran demokrasi Pak Hatta. Pak Hatta (Alm.) menulis tulisan yang terkenal dan dilarang oleh Bung Karno yang menyatakan bahwa demokrasi kita telah mati. Pemerintahan Presiden Suharto juga dikatakan olehnya sangat demokratis dan tidak menyalahinya sebagai Presiden Bush dari Amerika Serikat selalu menamakan diri ini juga menamakan dirinya sebagai presiden dari Negara penegak Hak Asasi Manusia (HAM). Akan tetapi, dari Amerika Serikat kita mengetahui peranan Amerika yang bebas menginvasi Negara-negara berdaulat. Dengan dalih demokrasi dan penegak HAM, Amerika dengan tanpa malu-malu membantu Israel membunuh bayi, wanita, dan orang Palestina yang ingin membangun negaranya sendiri. Inilah demokrasi yang dikembangkan oleh Amerika sebagai Negara kampiun demokrasi dan HAM.

Demokrasi tampaknya tidak bisa dipisahkan dari pemerintahan dan kegiatan politik. Semua proses politik dan lembaga pemerintahan berjalan seiring dengan jalannya demokrasi. Oleh karena itu, Ranny (1996) dalam bukunya Miftah Thoha (2014:154), berpendapat bahwa: demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang ditata dan diorganisasikan berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*popular sovereignty*), kesamaan politik (*popular*

consultation), dan berdasarkan pada aturan suara mayoritas. Berdasarkan konsep Ranny inilah saya pada kesempatan kali ini ingin meninjau pelaksanaan demokrasi dalam pemerintahan.

1. Kedaulatan Rakyat (*Populer Sovereignty*)

Secara singkat dikatakan bahwa prinsip kedaulatan rakyat itu menekankan bahwa kekuasaan tertinggi (*the ultimate power*) untuk berada di tangan beberapa atau salah satu dari orang tertentu. Bung Hatta dahulu mengatakan bahwa, prinsip kedaulatan rakyat yang berdaulat rakyatnya bukan tuanku. System pemerintahan yang demokratis adalah sistem yang meletakkan kedaulatan dan kekuasaan berada di tangan rakyat, bukan berada di tangan barangkali suatu cara yang baik untuk mengenal dan memahami demokrasi dengan mencoba mengidentifikasi pengertian yang pokok dan mencoba memberikan spesifikasi dari pengertian tersebut.

2. Kesertaan Politik (*Political Equality*)

Prinsip dasar kedua dari pemerintahan yang demokratis ialah adanya kesertaan atau kesamaan politik. Kesertaan politik memerlukan bahwa setiap warga Negara dewasa mempunyai kesempatan yang sama dengan yang lainnya untuk berperan serta dalam proses pembuatan kebijakan atau keputusan politik. Prinsip ini sering kali diwujudkan oleh semboyan “*one person one vote*”, akan tetapi semboyan ini belum mencerminkan kesertaan politik yang dimaksudkan oleh pemerintahan yang demokratis.

3. Konsultasi Rakyat (*Populer Consultation*)

Prinsip konsultasi rakyat ini merupakan syarat ketiga dari dari system pemerintahan yang demokratis. Prinsip ini mempunyai dua ketentuan, yakni :

Pertama, Negara harus mempunyai mekanisme yang melembaga yang digunakan oleh pejabat Negara memahami dan mempelajari kebijakan publik sesuai dengan yang dikehendaki dan dituntut oleh rakyat. *Kedua*, Negara harus mampu mengetahui secara jelas preferensi rakyat. Dengan demikian, pejabat pemerintah bisa meletakkan preferensi tersebut dalam konteks pembuatan publik walaupun preferensi tersebut tidak seluruhnya dipakai. Dua ketentuan ini merupakan konsekuensi logis dari kedaulatan rakyat dan demokrasi.

4. Kekuasaan Mayoritas (*Majority Rule*)

Prinsip demokrasi yang keempat ialah kekuasaan mayoritas. Manakala rakyat dalam pemerintahan yang demokratis menyetujui dengan suara bulat terhadap suatu kebijakan publik sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, maka pemerintah harus mengikuti melaksanakan kebijakan publik tersebut. Namun demikian, di hamper setiap Negara demokrasi suatu bulat seperti ini jarang bias diwujudkan. Keputusan politik di dalam demokrasi pada akhirnya menjadi suatu pilihan dari alternative kebijakan yang ada. Masing-masing pilihan mempunyai pendukung dari orang-orang atau rakyat yang berdaulat tersebut. Konsekuensinya pada situasi tertentu ada kelompok yang memang ada pula yang kehilangan atau kalah. Sekarang, timbul persoalannya, bagaimana seharusnya pemerintahan yang demokratis itu tetap berdiri di atas prinsip bahwa proses pengambilan keputusan berada pada seluruh rakyat. Ada sikap dan perilaku yang santun dalam demokrasi,

bagi kelompok atau pihak minoritas yang kalah dengan kebesaran hati dan terhormat ikhlas memberikan selamat dan kesempatan kepada kelompok mayoritas yang menang.

Demikianlah pemerintahan yang demokratis itu dijalankan sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, kesamaan politik, konsultasi rakyat, dan suara mayoritas dari rakyat. Empat prinsip ini semuanya berakhir kepada rakyat, seperti pengertian asli demokrasi sendiri, yakni: suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selain itu, pelaksanaan demokrasi yang mewujudkan prinsip-prinsip di atas semuanya sangat tergantung pada actor-aktor yang melaksanakan prinsip-prinsip tersebut.

2.2. Pemerintah Desa

Menurut Hanif Muchlis (2011:2), desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal hidup begotong royong, memiliki adat istiadat relatif sama dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatan sebagai mata pencarian petani dan nelayan.

Selanjutnya, dinyatakan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, pasal 1, ayat 12 yang menjelaskan bahwa :

“Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari pengertian desa tersebut, didapatkan kata kunci, kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Artinya desa itu memiliki hak otonomi.

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas pokok memimpin dan mengoordinasikan pemerintah desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembinaan dan pembangunan masyarakat, serta menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah atasnya. Kepala Desa hanya menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya.

Tugas dan kewajiban kepala desa adalah :

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintah desa;
- b. membina kehidupan masyarakat desa;
- c. membina perekonomian desa;
- d. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- e. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- f. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris desa adalah staf yang memimpin Sekretaris Dsa. Sekretariat Desa bertugas membantu kepala desa di bidang pembinaan administrasi dan

memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat pemerintah desa. Sekretaris Desa dijabat oleh PNS yang memenuhi syarat.

3. Kepala Urusan

Kepala urusan adalah staf yang membantu sekretaris desa sesuai dengan bidangnya. Kepala urusan bertanggung jawab kepada sekretaris desa. Kepala urusan terdiri atas :

- a. Kepala Urusan Pemerintahan;
- b. Kepala Urusan Pembangunan;
- c. Kepala Urusan Administrasi;

Untuk desa yang besar dan urusannya banya, bisa ditambah dengan:

- a. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat;
- b. Kepala Urusan Keuangan;
- c. Kepala Urusan Umum;

4. Pelaksana Urusan

Pelaksana urusan adalah staf yang melaksanakan urusan teknis lapangan, seperti air (ulu-ulu), urusan agama Islam (modin). Pelaksana urusan bertanggung jawab kepada kepala desa.

5. Kepala Dusun

Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas kepala desa di wilayah kerjanya. Tugas kepala dusun menjalankan tugas kepala desa di wilayah kerjanya.

2.3. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

Menurut Hanif Nurcholis (2010 : 5.32) BPD adalah badan pembuat kebijakan dan penyalur aspirasi masyarakat desa. Anggota BPD adalah wakil-wakil dari penduduk desa yang terdiri atas Ketua RT/RW, pemangku adat, dan tokoh-tokoh masyarakat. BPD dipimpin oleh dua dari anggota BPD sendiri. BPD merupakan semacam DPRD kecil yang mewakili rakyat desa dalam pemerintahan desa.

BPD adalah mitra kepala desa. BPD bersama dengan kepala desa memikirkan desanya agar maju dan sejahtera. BPD tidak dibenarkan menjadi lawan kepala desa. Jika BPD menjadi lawan kepala desa, ketentraman rakyat terganggu. Jalannya pemerintahan menjadi tidak stabil. Pembangunan tidak bisa berjalan. Akhirnya rakyat menderita.

Tugas BPD adalah :

- a. Membuat Peraturan Desa bersama kepala desa. Peraturan Desa kalau di pemerintah daerah disebut Peraturan Daerah, kalau di tingkat negara disebut undang-undang. Jadi, Peraturan Desa adalah peraturan perundangan di tingkat desa yang isinya mengatur masalah bersama/publik. Misal peraturan daerah tentang pengaturan tanah bengkok;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

2.4. Dinamika Politik Lokal

Politik lokal di Indonesia selalu berubah sepanjang tahun. Pada era sebelum kemerdekaan, politik lokal di Nusantara menunjukkan potret buram

karena penguasa memperoleh kekuasaan dalam kerangka hukum adat yang totaliter. Akibatnya mayoritas masyarakat hanya diakui sebagai hamba (bukan warga) yang tidak pernah menjadi objek dari pembangunan semasa itu. Masyarakat dijadikan objek dari kehidupan politik yang tidak berpihak kepada mereka. Para penguasa selalu menarik pajak dan upeti melalui aparat represif yang menjadikan kondisi ekonomi masyarakat semakin terpuruk. Perlakuan penguasa yang tidak manusiawi itu kemudian mencetuskan perlawanan rakyat. Kehadiran dan kiprah orang kuat lokal telah menegaskan atas melembaganya kicak strongmen dan polisentrisme di masa lalu.

Setelah proklamasi kemerdekaan, ketika kekuatan masyarakat mulai masuk ke lembaga-lembaga formal yang merupakan legasi positif dari kolonial Belanda untuk menyediakan kesempatan bagi masyarakat awam terlibat dalam konteks implementasi politik etis. Para elit tradisional harus bersaing dengan masyarakat umum yang sama-sama berusaha mendapatkan posisi dalam lembaga negara. Ketegangan politik yang bernuansa etnisitas pun meningkat secara Demokrasi Parlemen dan Demokrasi Terpimpin khususnya di luar Jawa dimana militer ikut campur tangan. Indonesia di bawah kekuasaan rezim otokratik (1996-1998) selama 30 tahun lebih, sistem politik ditingkat pusat maupun daerah sangat terkontrol oleh pusat kuasa di Jakarta. Badan eksekutif dan legislatif di kabupaten, kota, dan provinsi terkunci dalam hegemoni Jakarta ini disebabkan posisi pejabat di daerah pada dasarnya ditentukan oleh Depdagri yang berkepentingan mengendalikan kekuasaan elit lokal. Hal tersebut terlihat dalam upaya yang dilakukan elit politik pusat pada saat pemilihan gubernur Riau pada tahun 1985.

Kontrol tidak hanya dilakukan oleh Pusat pada lembaga sipil dipemerintahan daerah saja, tetapi juga dilaksanakan pada lembaga kemiliteran.

Elit politik pusat telah menyiapkan hadiah kepada perwira aktif maupun purnawirawan yang setia dan mau tunduk terhadap kehendak pusat dengan memberikan kepada mereka kursi dilegislatif dan eksekutif. Ledakan politik yang didenatori oleh gerakan mahasiswa berhasil menghancurkan kuasa pusat di Jakarta. Ambruknya Orde Baru sekaligus menandai polisentrime baru yang menolak kuasa pusat. Perubahan haluan dari politik lama yang tersentralisasi dan terkontrol kepada politik baru yang terdesentralisasi dan egaliter membawa angin segar bagi politik lokal di Indonesia.

Melalui prosés demokratisasi dan desentralisasi, para lokal strongmen dan bos ekonomi semakin memperoleh kesempatan untuk menjabat kursi sentral di lembaga pemerintah daerah dibandingkan masa sebelumnya. Dalam konteks lain politik lokal juga mesti dipahami sebagai arena persaingan antara birokrat dari bangsawan, birokrat dari masyarakat awam, dan para local strongmen. Hal tersebut memperlihatkan bahwa politik lokal di Indonesia mengalami dinamika politik yang sering kali bergejolak. Keadaan seperti ini akibat dari pengendalian ketat oleh pemerintah pusat, pembatasan luas biasa atas kebebasan berpendapat di bidang politik dan ekonomi, eksploitasi dan penggelapan sumber daya. Banyak diantara peningkatan konflik, persaingan, maupun manfaat jangka pendek yang terjadi terkait dengan hal tersebut ini akan menimbulkan pertarungan untuk memperoleh akses antara berbagai kekuatan sosial, ekonomi dan politik dengan pemerintah daerah, dan antara pusat dengan daerah.

Menjadi menarik karena Undang-Undang telah menyediakan lahan pertarungan tersendiri pasca reformasi. Namun aktor lokal yang tidak memiliki patron, modal politik, ekonomi, dan sosial sulit sekali menjadi aktor nasional. Salah satu cara mudah yaitu melalui otonomi daerah untuk sekali menggejolak dan selalu menjadi sorotan dunia Publik. Keadaan semacam ini setidaknya dapat dijelaskan oleh tiga faktor yang paling monumental. Yaitu :

Pertama, konflik politik lokal berpeluang lebar muncul sebagai konflik terbuka, dan tak bisa ditutup-tutupi lagi, misalnya oleh kekuatan politik tingkat pusat. Sebab pada zaman Orde Baru, jangankan konflik politik, konflik sosial pun “tidak sampai ke permukaan”. Itu disebabkan kuatnya “negara” dalam mengontrol segala hal (tetek bengek) urusan politik dari tingkat lokal hingga nasional, dengan pola kebijakan yang amat sentralistik. Sehingga memunculkan kebebasan yang belum pernah dialami.

Kedua, akibat ledakan politik yang belum bisa lepas sepenuhnya dari fenomena eforia. Hakikat berpolitik pun rata-rata belum bisa dipahami secara benar. Menjadi politisi masih dianggap sama dengan profesi lain. Mochamad Basuki, misalnya, bahkan terang-terangan mengatakan, kalau mau kaya jadilah politisi. Tentu saja ungkapan ini agak aneh, mengingat profesi politisi, berbeda dibanding pengusaha.

Dan yang ketiga, bisa dijelaskan dengan teori “desentralisasi korupsi”. Meminjam sinyalemen Ketua Indonesia *Corruption Watch (ICW)* Teten Masduki, pasca-Orde Baru, tak hanya struktur kebijakan sentralistik yang berubah, seiring otonomi daerah (desentralisasi), tetapi juga pola korupsinya. Bila dulu korupsi

terpusat, itu bisa dipilah ke lingkup “istana” (Cendana), kini polanya menyebar dan merata dari tingkat pusat dan daerah. Setidaknya lebih ekspresif.

Dalam perjalannya, pergulatan politik di arus bawah panca otonomi memiliki banyak persoalan yang cukup pelik. Hal ini disebabkan karena banyaknya elemen masyarakat yang ingin menduduki roda kepemimpinan, meskipun dalam ranah arus bawah. Sehingga banyak menimbulkan konflik dan pertumpahan darah yang tak pernah terselesaikan. Ironisnya, dalam keadaan semacam ini, maka kekuatan dan kekayaanlah yang menentukan. Meskipun orangnya cerdas dan mempunyai jiwa kepemimpinan serta komitmen yang tinggi, akan dengan mudahnya tersingkirkan dalam pertarungan. Jika orang tersebut tidak mempunyai kekayaan untuk menyogok dalam pemilihan tersebut. Dan hal semacam ini akan tetap saja terus terjadi akibat dari kebebasan yang mereka miliki, <http://www.kompasiana.com> (5 Desember 2015).

Penyebab Terjadi Dinamika Politik Lokal

Perkembangan dan wacana tentang dunia berpolitik sampai kapanpun akan selalu menarik untuk dikaji secara lebih lanjut. Sebab bagaimanapun juga dunia perpolitik merupakan salah satu jalan yang paling efektif yang biasa digunakan oleh elit penguasa untuk mendapat dan mempertahankan kekuasaan yang lebih tinggi tersebut. Entah perpolitikan yang digunakan itu melalui politik yang kotor maupun politik yang bersih. Namun yang jelas dunia perpolitikan selalu menjadi sorotan seluruh masyarakat dan dunia publik.

Apalagi bila yang dikaji dan diperbincangkan terkait dengan berbagai dinamika dan perkembangan politik yang terjadi di arus bawah (politik lokal).

Tentunya akan mempunyai kesan tersendiri. Hal ini akan mempunyai daya tarik tersendiri dan unik dibandingkan dengan membicarakan politik elit pemerintah pusat. Mengingat politik yang terjadi di arus bawah sepanjang masa pemerintahan otoriter di bawah rezim orde baru dan reformasi, pemilihan kepala daerah selalu saja dikuasai dan disetting oleh sekelompok elit Jakarta maupun di daerah-daerah sehingga para arus bawah tidak dapat mengetahui dan mengerti tentang bagaimana proses dan seleksi yang dilakukan pemerintah pusat.

Memang sejak proses reformasi digulirkan delapan tahun terakhir ini, terjadi pergeseran pendulum politik pasca Orde Baru yang merambah hingga ke ranah politik lokal. Pasca masa Orde Baru, kondisi dan dinamika politik yang terjadi di arus bawah, <http://muslimpoliticians.blogspot.co.id> (5 Desember 2015).

2.5. Kerangka Pemikiran

Sebelum melangkah lebih lanjut, seorang peneliti harus terlebih dahulu menentukan kerangka pemikiran sebagai landasan berpijak dalam melaksanakan penelitian. Menurut Suharsini Arikunto (2006:65) mengemukakan “Kerangka pemikiran adalah suatu hal yang diyakini kebenarannya oleh peneliti yang harus dirumuskan secara jelas, yang nantinya berguna untuk memperkuat permasalahan dan membantu peneliti dalam memperjelas menetapkan obyek penelitian, instrumen pengumpulan data, serta wilayah pengambilan data”.

Desa merupakan struktur pemerintahan yang paling rendah di masa orde baru Desa kurang diperhatikan oleh Pemerintahan Pusat. Sejak tahun 2014 Desa mulai diperhatikan oleh pemerintahan dalam hal ini pemerintahan pusat. Bukti pemerintahan peduli terhadap pembangunan Desa keluarnya Undang-Undang

(UU) No. 6 Tahun 2014 dan diatur dalam Peraturan pemerintahan (PP) No. 43 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Desa juga memiliki otonomi yang berhak mengurus atau mengatur masyarakat Desa. Hanya otonomi desa bukan otonomi formal seperti yang dimiliki pemerintahan Provinsi, Kota dan Kabupaten, tetapi otonomi berdasarkan adat istiadat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan Desa bersama-sama dengan Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan semacam DPR kecil yang mewakili rakyat Desa dalam Pemerintahan Desa.

Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau masyarakat perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan masa jabatan badan permusyawaratan Desa (BPD) enam tahun dan dapat berhenti karena :

- a. meninggal dunia
- b. permintaan sendiri
- c. diberhentikan

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Lokasi Penelitian, Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Menurut Kurt dan Miller dalam Moleong (2004:3) Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kekuasaannya sendiri dan berhubungan dengan bahasa dan dalam peristilahannya.

Menurut Spradley dalam Sugiyono (2010 : 19) Pendekatan Penelitian kualitatif dilakukan secara proses siklus atau melingkar (*Cyclical*), bukan proses *linier*. Oleh sebab ini penelitian kualitatif juga berpedoman kepada paradigma *pluralistic* atau beragam teknik pengumpulan data yang dapat digunakan, untuk dapat memberikan rangkaian bukti yang diperlukan untuk meningkatkan validitas data yang dikumpulkan.

Menurut Sudjarwo dalam Sujarwani (2010:203) penelitian kualitatif harus memiliki prinsip yaitu peneliti harus menjadi partisipan yang aktif bersama obyek yang diteliti, disini diharapkan peneliti mampu melihat sesuatu fenomena di lapangan secara struktural dan fungsional.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah

eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada *generalisasi* (Sugiyono, 2014:1)

Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik.

Dengan menggunakan prosedur-prosedur statistic atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran), penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain.

3.1.2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dapat digunakan pada penelitian yang memerlukan pengungkapan tentang fenomena sosial secara mendalam. Seperti yang diungkapkan oleh Moh. Nazir (2003:16) “Penelitian deskriptif mempelajari tentang masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku pada masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena”

3.1.3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

3.1.4. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2016 - April 2016.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari lapangan Peneliti menggunakan beberapa metode Pengumpulan Data sesuai dengan Jenis Penelitian, adapun Metode Pengumpulan Data sebagai berikut :

a. Wawancara

Menurut Arikunto (2006:115) wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari yang diwawancarai. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan agar memperoleh data keterangan, pandangan, serta pendapat dari responden agar diperoleh informasi yang relevan.

b. Observasi

Menurut Husaini (2011:52) observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti kegiatan pengamatan dan pencatatan dilakukan secara langsung pada objek penelitian dengan cara non partisipasif artinya peneliti tidak ikut serta dalam proses kerja dan mencatat hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam melakukan observasi ini

penelitian terlebih dahulu ke lokasi ataupun tempat yang ingin diteliti yaitu Desa Tanjung Selamat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

a. Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, kerangka-kerangka ilmiah, skripsi tesis dan disertai, peraturan-peraturan buku tahunan dan sumber-sumber tertulis.

1. Informasi Kunci

Informasi kunci adalah merupakan yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperoleh dalam penelitian, yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Informasi kunci dalam penelitian ini sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjung Selamat.

2. Informasi Tambahan

Informasi tambahan yaitu mereka yang memberikan informasi walaupun tidak terlibat di dalam interaksi sosial yang diteliti. Adapun informasi tambahan dalam penelitian ini adalah Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjung Selamat.

Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung yang berupa hasil wawancara dengan informan selain itu dapat yang diperoleh dari lapangan.

b. Data Skunder

Data Skunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.

3.3 Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dimana menurut Miles dan Huberman (2010 : 255) analisis data kualitatif tentang mempergunakan kata-kata yang selalu disusun dalam sebuah teks yang diperluaskan atau dideskripsikan.

Menurut Sugiyono (2012:244) metode analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari kemudian membuat kesimpulan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Sedangkan untuk analisis data sangat perlu, sebagaimana dinyatakan Bogdan dan Taylor (2010 : 254) mendefenisikan analisis data sebagai proses yang mencari usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada ide itu.

Analisis data dalam metode kualitatif dilakukan secara bersamaan melalui proses pengumpulan data. Menurut Miles dan Humberman (2010 : 255) analisis data meliputi :

1. Pengumpulan Data

Penelitian mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi

2. Redukti Data

Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi merupakan suatu bentuk analisis data yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah direduksi, memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan.

3. Penyajian Data

Penyajian Data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun, memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4. Pengambilan keputusan atau verifikasi

Setelah data disajikan, maka dilakukan pengambilan keputusan dan verifikasi. Untuk itu diusahakan untuk mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, dan lain sebagainya. Jadi dari data tersebut diusahakan untuk mengambil suatu kesimpulan. Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan, didasarkan pada reduksi data, dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

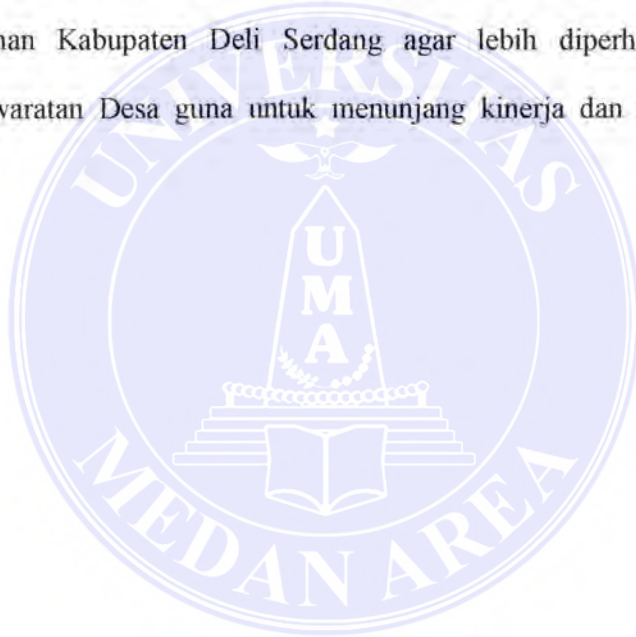
Proses Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjung Selamat Periode 2014 – 2020 dilaksanakan secara musyawarah perwakilan yang diutus perdesun 5-10 orang untuk memilih anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemilihan Desa Tanjung Selamat tidak melibatkan keterwakilan Perempuan merujuk peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Percut 72 dalam pemilihan Ketua Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan dengan musyawarah mufakat di dalam anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Desa Tanjung Selamat dalam pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Ketua, belum berjalan dengan baik dikarenakan masih melanggar pola keterwakilan perempuan pasal 72 dan melihat tingkat demokrasi masyarakat Tanjung Selamat masih rendah dilihat masyarakat yang hadir dalam Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa dan ketua, masyarakat tidak aktif di dalam forum, minat masyarakat untuk ikut dalam keanggotaan kurang melihat honor yang diberikan Pemerintah minim inilah isu yang beredar di masyarakat sebelum pemilihan.

5.2 Saran

1. Untuk tahun yang akan datang pemilihan Badan Permusyawaratan dilaksanakan secara langsung

2. Panitia pemilihan Badan Permusyawaratan lebih giat mengajak masyarakat dalam berdemokrasi di Desa Tanjung Selamat.
3. Mengikutsertakan perempuan dalam pemilihan dan keanggotaan.
4. Bagi panitia pemilihan Badan Permusyawaratan Desa untuk mengajak anak muda menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa yang sudah cukup umur sesuai dengan aturan yang berlaku.
5. Bagi anggota dan ketua terpilih periode 2014-2020 untuk lebih ditingkatkan dalam pengawasan pembangunan juga dalam administrasi pemerintahan
6. Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang agar lebih diperhatikan Badan Permusyawaratan Desa guna untuk menunjang kinerja dan meningkatkan ekonomi.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. 2006. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Enceng. 2010. *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Jakarta. Universitas Terbuka
- Hadi, Sutrisno. 1987. *Methodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM
- Hermawan, warsito. 1992. *Pengantar Metodologi Penelitian: Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Lexy J, Moreong. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosda Karya.
- Nazir, Anoh. Phd. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta. PT. Ghalian Indonesia.
- Novcholis, Hanif. 2010. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta. Erlangga
- Respationo, Soerya. 2010. *Etika Politik dalam suatu Negara Demokrasi Perdana Publishing*.
- Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang Setara Press
- Sujarwani, Wiratna V. 20214. *Metodologi Penelitian*. Pustaka Barupress. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan PLD*. Alfabeta. Bandung
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.

Thoha, Miftah. 2014 *Birokrasi dan Dinamika Kekuasaan*. Jakarta Prenada Medua Group

Usman Husain.2011 *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara

<http://www.kompasiana.com/dewinastitik/dinamika-politik-lokal-di-indonesia-55of5a64813311c82cbc674>. 19:20Wib Tgl diakses 5 Desember 2015

<http://muslimpoliticians.blogspot.co.id/2012/02/penyebab-terjadinya-dinamika-politik.html>. 19:20 Wib Tgl diakses 5 Desember 2015

